



Media: Republika

Hari: Senin

Tanggal: 12 April 2021

Halaman: 8

DIY Masih Tunggu Kebijakan Larangan Mudik Lebaran

■ SILVY DIAN SETIAWAN

SLEMAN — Pemerintah Daerah (Pemda) DIY masih menunggu kebijakan terkait larangan mudik lebaran dari pemerintah pusat. Hingga saat ini, belum ada detail dari kebijakan larangan mudik lebaran yang diberikan kepada pemda.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, pihaknya belum berani mengeluarkan kebijakan terkait larangan mudik lebaran ini. Sehingga, kebijakan akan dikeluarkan usai adanya detail kebijakan dari pemerintah pusat.

"Terkait masalah larangan atau ketentuan untuk menghadapi libur panjang, kita tunggu saja. Dari kondisi seperti itu, saya tidak berani untuk mendahului karena nanti keputusan itu yang akan diadukan seluruh provinsi," kata Sultan di RSUP dr Sardjito, Sleman, Sabtu (10/4).

Terkait penekatan yang akan dilakukan di lebih dari 300 lokasi yang dilakukan pemerintah pusat, Sultan juga belum tahu persis. Baik itu terkait teknis maupun personel yang melakukan penekatan nantinya belum diketahui secara pasti. "Saya tidak tahu persis ya, itu (terkait penekatan) tenaganya akan dari departemen (kementerian) atau dari daerah," ujar Sultan.

Ia menyebut, jika nantinya personel diharuskan dari daerah masing-masing, maka DIY pun sebenarnya sudah melaksanakan hal tersebut. Pasalnya, kata Sultan, di tiap pintu masuk RT/RW, desa, kelurahan maupun kecamatan ada posko yang menyaring siapa saja yang keluar dan masuk. Sehingga, mobilitas masyarakat pun juga sudah terbatas melalui pengawasan di pintu masuk tersebut. Walaupun begitu, Sultan berharap agar tiap kebijakan yang dikeluarkan dapat dilakukan secara konsisten.

"Hanya harapan saya konsisten (larangan mudik lebaran) itu dilakukan kalau memang dilarang. Nanti saja kalau keputusannya sudah dibuat, karena kalau daerah kan mengikuti keputusan itu," jelas Sultan.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sudah melarang aparat sipil negara (ASN) bepergian keluar kota selama masa mudik lebaran 2021. Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, kebijakan ini dikeluarkan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021. "Kami melarang teman-teman ASN untuk melakukan perjalanan luar kota pada masa larangan itu," kata Haryadi di Yogyakarta, Jumat (9/4).

Pemerintah pusat menetapkan larangan mudik lebaran yang berlaku mulai 6-17 Mei 2021. Haryadi menyebut, pihaknya juga tidak akan mengeluarkan perintah perjalanan dinas untuk ASN selama masa mudik dan libur lebaran. "Kami minta Kepala OPD (organisasi perangkat daerah) jangan memerintahkan perjalanan dinas," ujar Haryadi.

■ ed: ferman rahadi

ston

19690723

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005